

JURNAL

**TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU PEMALSUAN SURAT
KENDARAAN BERMOTOR DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

Fabel Muhammad Nuryan

NPM : 120510853

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU PEMALSUAN SURAT
KENDARAAN BERMOTOR DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

Fabel Muhammad Nuryan

NPM : 120510853

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 24 April 2017

Ch. Medi Suharyono, S.H.,M.Hum

TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU PEMALSUAN SURAT KENDARAAN BERMOTOR DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Fabel Muhammad Nuryan

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : fabelmuhammadmst@gmail.com

Abstract

Increasing faking a motor vehicles in the yogyakarta special district cause harm to the owner of motor vehicles , the unlawful impact of this loss to the state of owing to happen smuggling law by not doing is paying taxes of a vehicle music .Legal problems raised is whether the act of police the suspect forgery a motor vehicles in the province of you .The purpose of this research to obtain data about what taken the suspect forgery a motor vehicles in the data you in research law empirical collected through interviews with informants and study literature .Police you have done its functions and tasks the as mandated in from the law. His advice is performance and police efforts yogyakarta maintained and coordinating activities with parties or the related agencies in order to control the the act of forgery a letter vehicles in jurisdiction.

Keyword: Faking, police efforts of Yogyakarta special district, forgery, letters of motor vehicle

1. PENDAHULUAN

Kepolisian merupakan lembaga sub sistem dalam sistem peradilan pidana yang mempunyai kedudukan pertama dan utama atau *the gate keeper of the criminal justice system* seperti yang dikatakan oleh Hatkristuti Harkrisnowo. Tatkala penyimpangan yang dilakukan polisi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diisi dengan tindakan kekerasan dan hal terlarang lainnya. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian harus mengutamakan hak asasi manusia dalam setiap melaksanakan tugas dan wewenangnya. Wajib memperhatikan secara seksama peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

perkembangan kemajuan masyarakat yang pesat, serta bertambah canggihnya teknologi dan cara hidup yang berubah menjadi suatu tantangan tersendiri bagi kepolisian. Dampak dari kemajuan tersebut melahirkan fenomena-fenomena dalam masyarakat dan kejahatan dengan modus operandi yang baru dan canggih. Tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Negara Indonesia semakin besar dalam menjaga keamanan. Tuntutan perkembangan mengharuskan polisi lebih meningkatkan mutu dan kemampuan untuk memerangi kejahatan.

Kejahatan merupakan fenomena kehidupan manusia dan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat yang perlu mendapat

perhatian penuh. Bergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, kebudayaan, dan berbagai hal lainnya yang memicu terjadinya kejahatan. Berhadapan dengan suatu gejala yang luas dan mendalam, yang bersarang sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat, sehingga membahayakan kehidupan setidaknya menimbulkan kerugian.¹ Juga merupakan penyakit masyarakat dalam konteks ini yaitu segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma yang ada di dalam masyarakat dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum.²

Salah satu kejahatan yang menjadi perhatian kepolisian adalah tindakan pemalsuan surat kendaraan bermotor. Besarnya tingkat pencurian kendaraan bermotor dikota-kota besar khususnya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyebabkan adanya tindakan pemalsuan surat kendaraan bermotor. Pemalsuan surat kendaraan bermotor seperti Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) menjadi bisnis yang menggiurkan. Salah satu pelaku yang telah tertangkap di daerah Kabupaten Sleman yang melakukan pemalsuan kendaraan bermotor dapat meraup keuntungan sebesar Rp. 50 Juta per bulannya. Kegiatan pemalsuan kendaraan bermotor dilakukan oleh sindikat yang terorganisir sehingga kelompok tersebut berkembang pesat.

Pemalsuan kendaraan bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta marak terjadi sekarang ini, dengan bermodal alat scan, komputer dan printer para pelaku dapat membuat surat kendaraan bermotor yang palsu. Surat-surat yang dibuat sangat mirip dengan yang aslinya sehingga sulit dibedakan bagi orang awam. Kendaraan yang surat-suratnya dipalsukan biasanya merupakan kendaraan hasil curian yang nantinya akan dijual kembali. Untuk itu masyarakat Yogyakarta perlu waspada dan teliti jika ingin membeli kendaraan bekas.

Atas fenomena kejahatan tersebut, polisi sebagai pelindung masyarakat harus berperan aktif untuk mengatasi masalah kejahatan pemalsuan surat kendaraan bermotor. Polisi dituntut kesigapannya menangkap pelaku pemalsuan surat kendaraan bermotor demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat khususnya di daerah Yogyakarta.

Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peran penting dalam negara hukum. Didalam negara hukum, kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum.³ Kepolisian merupakan lembaga hukum dan hidup

¹ Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia* 2, PradyaParamitha, Jakarta, Hlm. 2.

² Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 53.

³ Sadjijino, 2008, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Catatan Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 1.

dalam komunitas manusia yang lebih besar yang dapat membentuk segala sesuatu yang dilakukan organisasi, maka peletakan lembaga Kepolisian dalam suatu organisasi negara menjadi lebih penting, karena akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan serta kinerja lembaga Kepolisian.⁴

1. Hal ini sebagaimana tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Sebagai salah satu aparat penegak hukum tentunya POLRI memiliki peran dan tugas yang diatur sesuai dengan hukum, yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. **Pengertian, Tugas dan Wewenang POLRI**

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara tidak memiliki kesamaan, seperti di Inggris "*police*" yang juga dikenal adanya istilah "*constable*", di Jerman dikenal dengan "*polizer*", di Amerika "*Sheriff*", di Belanda "*politie*", di Jepang "*koban*" dan "*chuzaisho*" walaupun istilah *koban* merupakan suatu nama pos polisi di wilayah kota dan *chuzaiso* adalah wilayah pos polisi di pedesaan.⁵ Di Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) mempunyai pengertian yang berbeda. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan polisi sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum

(seperti menangkap orang yang melanggar Undang-Undang dan sebagainya).⁶

Pengertian Kepolisian pada Pasal 1 angka (1) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penjabaran lebih lanjut mengenai Kepolisian ada pada Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut; "Pasal 5 ayat (1) : Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Pasal 5 ayat (2) :
Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."

Lembaga Kepolisian mempunyai jenjang kesatuan dalam menjalankan organisasinya, mulai dari tingkat pusat sampai

⁴ *Ibid*, hlm. 2.

⁵ Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang, Yogyakarta, hlm. 3.

⁶ Departemen Pendidikan, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Keempat, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1091.

pada daerah terkecil. Penempatan markas atau kantor polisi bertujuan untuk dapat memonitor masyarakat diseluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Kepolisian tingkat pusat disebut Mabes Polri adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI). Kapolri adalah pimpinan Polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kapolri berpangkat Jenderal Polisi.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pengertian Kamtibmas menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 adalah:

“Suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menangulangi segala bentuk

pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.”⁷

Tugas Kepolisian merupakan sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merumuskan tugas-tugas adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian bertugas :

- a. Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

⁷ Gaussyah. M, 2014, *Peranan dan kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan*, Cetakan Pertama, Kemitraan, Jakarta, hlm. 35.

- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas-tugas Kepolisian yang telah disebut diatas akan terselenggarakan dengan baik apabila dijalankan oleh Kepolisian yang berorientasi pada masyarakat yang dilayani, meliputi :

- a. Orientasi pada fungsi kepolisian yang ideal, artinya tugas-tugas kepolisian diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat aman dan tertib. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan berpedoman pada asas-asas :
 - 1) *Legitimacy*, artinya dalam menjalankan tugas kepolisian mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
 - 2) *Accountability*, artinya tugas dan wewenang kepolisian atas keberhasilan maupun kegagalannya dipertanggungjawabkan kepada rakyat, asas ini dimaknai setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Oleh karena fungsi kepolisian adalah bagian dari salah satu fungsi pemerintahan, maka tugas dan wewenang kepolisian yang dilaksanakan sesuai asas akuntabilitas dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
 - 3) Di dalam penyelenggaraan kepolisian wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- 4) Kekuasaan kepolisian sebagai kekuasaan yang mandiri.
 - 5) Menjamin adanya pengawasan dari masyarakat.
- b. Orientasi pada lembaga Kepolisian yang berfungsi secara ideal, yakni secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan dibentuknya lembaga Kepolisian, yaitu untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan pengayoman dan pelayanan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Wewenang Kepolisian dibagi menjadi 2 (dua) tipe wewenang yang meliputi wewenang umum dan wewenang khusus. Wewenang umum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi :

“Menerima laporan dan/atau pengaduan; Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Mengeluarkan

peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian; Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; Mencari keterangan dan barang bukti; Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.”

Sedangkan Wewenang Kepolisian bersifat khusus terdapat 2 (dua) penggolongan yaitu kewenangan yang berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Wewenang khusus pada Pasal 15 ayat (2) meliputi :

“Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya; Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; Memberikan surat izin mengemudi kendaraan

bermotor; Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam; Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan; Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian; Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional; Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait; Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional; Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.”

Wewenang khusus pada Pasal 16 ayat (1) meliputi :

“Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta

memeriksa tanda pengenal diri; Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; Mengadakan penghentian penyidikan; Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

2. Fungsi POLRI

Pengertian fungsi polisi terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Yang berbunyi :

“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Pengertian Kepolisian sebagai fungsi tersebut di atas sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian Kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan PerUndang-Undangan. Jadi, apabila kita membicarakan persoalan Kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga Kepolisian.⁸

Selanjutnya berkaitan dengan fungsi Kepolisian, lebih lanjut dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan, bahwa:

- 1) Pengembangan fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :
 - a) Kepolisian Khusus,
 - b) Penyidik pegawai negeri sipil, dan/atau
 - c) Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 2) Pengembangan fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan PerUndang-

Undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Kepolisian memuat pokok pikiran tentang subyek yang menyelenggarakan fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan istilah Pengembangan Fungsi Kepolisian. Pengembangan Fungsi Kepolisian ditemukan melalui penguraian fungsi dimensi Kepolisian yang terdiri dari dimensi yuridis dan sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi Kepolisian terdiri atas fungsi Umum dan fungsi Kepolisian Khusus, yakni:⁹

- a. Fungsi Kepolisian Umum berkaitan dengan kewenangan Kepolisian berdasarkan Undang-Undang dan atau peraturan PerUndang-Undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) Lingkungan kuasa soal-soal yang termaksud kompetensi hukum publik; (2) Lingkungan kuasa orang; (3) Lingkungan kuasa tempat; dan (4) Lingkungan kuasa waktu. Sedang pengembangan fungsi Kepolisian Umum, sesuai Undang-Undang ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga tugas dan wewenangnya dengan sendirinya akan mencakup keempat lingkungan kuasa tersebut. Selain dilihat dari

⁸ Pudi Rahardi. H, 2014, *Hukum Kepolisian Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Cetakan Ke-1, Laksbang Grafika, Surabaya, hlm. 56.

⁹ *Ibid*, hlm. 57

tataran fungsi Kepolisian, kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mencakup tataran *represif*, *preventif*, dan *preemptif*.¹⁰

- b. Fungsi Kepolisian Khusus, berkaitan dengan Kepolisian yang oleh atau atas kuasa Undang-Undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa Undang-Undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi Kepolisian Khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat Kepolisian Khusus, sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya, berada dalam lingkungan instansi tertentu antara lain: Bea Cukai, Imigrasi, Kehutanan, Pengawasan Obat dan Makanan, Patent dan Hak Cipta. Diantara pejabat pengamban fungsi Kepolisian Khusus, ada yang diberi kewenangan represif yustisial selaku penyidik dan disebut sebagai penyidik pegawai negeri sipil.¹¹

Dalam dimensi Sosiologis, fungsi Kepolisian terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan

ketertiban dilingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat. Setiap pengemban fungsi Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya sesuai dasar hukumnya masing-masing bersifat otonom. Dengan demikian hubungan antara pengemban fungsi Kepolisian bersifat fungsional dan saling melengkapi dengan menggunakan asas subsidiaritas.¹²

3. Susunan dan Kedudukan Organisasi POLRI

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, mengatur tentang susunan Polri, menyatakan bahwa:

“Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.”

Selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, mengatur tentang kedudukan Polri, menyatakan bahwa:

- 1) “Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁰ *Ibid*, hlm. 58.

¹² *Ibid*. hlm. 58-59.

¹¹ *Ibid*.

berada di bawah Presiden.

- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Peraturan lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi Polri terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia (Perpres Kepolisian), yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Polri, adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dalam bab II Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia yang mengatur mengenai Susunan dan Kedudukan Kepolisian Republik Indonesia Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa:

“Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi Kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah

hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Susunan Organisasi dan tata kerja Polri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia dalam Pasal 3, yang menyatakan yakni:

- 1) Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah berdasarkan daerah hukum sesuai dengan ketentuan peraturan PerUndang-Undangan;
- 2) Organisasi Polri dari tingkat pusat sampai tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, disingkat Mabes Polri;
 - b. Kepolisian Daerah, disingkat Polda;
 - c. Kepolisian Resort, disingkat Polres; dan
 - d. Kepolisian Sektor, disingkat Polsek.

Jadi, posisi Polri yang ada dibawah Presiden seharusnya merupakan

letak pertanggungjawaban secara manajemen, karena secara operasional polisi secara universal harus independent, bebas tanpa dikendalikan oleh suatu kekuatan apapun, begitu pula seharusnya dengan Kapolri. Dengan kedudukan langsung di bawah presiden, Polri memposisikan diri sebagai lembaga yang memproduksi kebijakan, dan operasional sekaligus, yang memang harus diakui atau tidak merupakan suatu kondisi yang tidak tepat bagi tata pemerintahan yang baik.¹³

Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah suatu tindak kejahatan yang didalamnya mengandung unsur suatu keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sebenarnya bertentangan dengan yang sebenarnya, sedangkan perbuatan memalsu adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau

seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula.¹⁴ Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan dalam kelompok kejahatan penipuan sehingga tidak semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu gambaran atas barang seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya, karena gambaran data ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat/data tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/data terjadi apabila isinya atau datanya tidak benar.¹⁵

1. METODE

Penelitian hukum empiris

Jenis yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer maupun sekunder.

¹³ Krisnapti, Kedudukan Polri dan System Kepolisian di Era Demokrasi, [file:///D:/Proposal/KEDUDUKAN%20POLRI%20DAN%20SYSTEM%20KEPOLISIAN%20DI%20ERA%20DEMOKRASI%20 %20KRISNAPTI K.htm](file:///D:/Proposal/KEDUDUKAN%20POLRI%20DAN%20SYSTEM%20KEPOLISIAN%20DI%20ERA%20DEMOKRASI%20%20KRISNAPTI%20K.htm), diakses 20 Desember 2016, pukul 23:15 WIB.

¹⁴ Adami Chazawi, 2005, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Cetakan III, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

¹⁵ H. A. K. Moch. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*, Alumni, Jakarta, hlm.190.

1. Cara pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Studi lapangan :

Wawancara adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

b. Studi Kepustakaan :

Studi kepustakaan adalah dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan dengan cara mencari data secara langsung yang ada di lapangan, untuk mengungkap kasus yang pernah terjadi, yang dilakukan di luar kepustakaan. Lokasi penelitian ini adalah Kepolisian Polda DIY.

3. Populasi dan Sampel :

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau gejala atau seluruh kejadian yang akan diteliti. Jumlah populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, sehingga tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu. Dalam suatu penelitian sebenarnya tidak perlu untuk meneliti semua obyek atau semua unit tersebut untuk dapat memberikan gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel.

Sampel adalah sekelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel

4. Responden dan narasumber

a. Responden dalam penelitian ini adalah anggota Kepolisian Polda DIY

b. Narasumber adalah subyek atau seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti.

5. Analisis data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan diolah menggunakan analisis kualitatif, artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh lapangan maupun kepustakaan baik secara lisan maupun tertulis. Metode yang dipergunakan untuk menarik kesimpulan adalah metode berpikir deduktif, yaitu berfikir dari yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulannya yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Preventif/Pencegahan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber Kanit III Sat Reskrim (Kepala Unit III Satuan Reserse Kriminal) Polres Sleman, IPTU Irvan Andhi Prasetya, menjelaskan bahwa untuk tindakan preventif/pencegahan sebenarnya bukan kewenangan

dari Sat Reskrim.¹⁶ Namun, biasanya untuk tindakan pencegahan pemalsuan surat kendaraan bermotor/mobil dilakukan dengan cara:

- a. Polisi melalui Babinkamtibmas (Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat) memberikan himbauan atau menganjurkan kepada masyarakat/pembeli kendaraan bermotor/mobil (terutama kendaraan bermotor/mobil bekas) agar lebih hati-hati dalam membeli, yaitu dengan cara mengecek surat-surat kendaraan bermotor/mobil, baik itu STNK maupun BPKB. Biasanya untuk STNK ada ciri-ciri materiil atau khusus, misalnya ada hologramnya, jenis kertas, ataupun gambar-gambar tersembunyi.
- b. Untuk para pengusaha rental kendaraan bermotor/mobil kenali dengan benar siapa penyewa serta apabila dimungkinkan dipasang GPS (*Global Positioning System*) atau alat pelacak kendaraan bermotor/mobil. Ditambahkan oleh Wakasat Reskrim (Wakil Kepala Satuan Reserse

Kriminal) Polresta Yogyakarta, AKP Yohannes R. Sigiyo (NRP 88011062), untuk tindakan pencegahan biasanya dilakukan dengan cara:

- a. Polantas (Polisi Lalu Lintas) dan Dishub (Dinas Perhubungan) membuat ciri-ciri khusus dalam STNK.
- b. Razia atau *sweeping* lalu lintas yang dilakukan oleh Polantas. Hal ini dilakukan untuk memeriksa surat-surat kelengkapan bermotor.

2. Represif/Penindakan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang penulis lakukan di Polresta Yogyakarta dan Polres Sleman didapat beberapa hasil penelitian terkait tindakan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY)¹⁷ terhadap pelaku pemalsuan surat kendaraan bermotor, yakni:

- a. Menurut Waka Satreskrim Polresta Yogyakarta, AKP Yohannes R. Sigiyo (NRP 88011062):
 - 1) Penyelidikan:¹⁸
Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Yogyakarta biasanya melakukan

¹⁶ Hal ini juga seperti yang dikatakan oleh Wakasat Reskrim (Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal) Polresta Yogyakarta, AKP Yohannes R. Sigiyo (NRP 88011062)

¹⁷ Dalam hal ini Polresta Yogyakarta dan Polres Sleman.

¹⁸ Menurut Pasal 1 angka 2 KUHP, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

penyelidikan ke komunitas-komunitas jual beli kendaraan *bodong* (kendaraan-kendaraan yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan).

Penyelidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polresta Yogyakarta ini dilakukan bisa dengan cara penyamaran (*undercover*), pembuntutan, interogasi, pelacakan (*tracking*), penyadapan (*tapping*, tapi ini hanya untuk kasus-kasus tertentu seperti korupsi atau narkoba). Kemudian ditelusuri lebih lanjut siapa pembuat STNK atau BPKB/Mobil palsu. Cara-cara tersebut dilakukan dengan cara seolah-olah anggota Satreskrim Polresta Yogyakarta bertindak sebagai oknum pembeli, dan kemudian dari hasil tersebut didapatkan informasi-informasi terkait keberadaan kendaran-kendaraan yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan.

2) Penindakan:

Ditahap ini didapat surat-surat pemalsuan kendaraan bermotor/mobil.

3) Penyidikan:¹⁹

Ditahap ini, Satreskrim Polresta Yogyakarta melakukan pembuktian suatu tindak pidana dan menentukan Tersangka terkait pemalsuan surat kendaraan bermotor/mobil.

b. Menurut Kanit III Satreskrim Polres Sleman, IPTU Irvan Andhi Prasetya:

1) Menghimbau kepada masyarakat yang merasa mengetahui keberadaan surat-surat kendaraan bermotor/mobil palsu atau yang merasa menjadi korban, segera laporkan kepada Satreskrim Polres Sleman agar dapat dilakukan penyelidikan terhadap yang diduga pelaku. Namun, ditambahkan juga oleh Narasumber bahwa penggelapan/pencurian /pemalsuan bukan merupakan delik aduan sehingga tidak harus menunggu laporan warga. Jika Satreskrim mengetahui atau menangkap secara

¹⁹ Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang dimaksud dengan Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

langsung adanya pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor maka anggota Satreskrim Polres Sleman dengan segera mengambil tindakan.

- 2) Tindakan yang diambil yakni berupa Penyelidikan, yaitu mencari pelaku dan barang bukti. Kemudian Penyidikan, yaitu mencari tahu apakah hal tersebut merupakan peristiwa pidana atau bukan melalui fakta-fakta. Apabila terbukti, maka dilakukan penyitaan²⁰ terhadap barang bukti.

2. KESIMPULAN

Dalam penelitian mengenai Tindakan Kepolisian Terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta yang penulis lakukan di Polresta Yogyakarta dan Polres Sleman, diperoleh kesimpulan bahwa tindakan yang diambil oleh Kepolisian DIY terhadap pelaku Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor adalah meliputi tindakan sebagai berikut:

1. Tindakan Preventif, yaitu:
 - a) Polisi Lalu Lintas (Polantas) bekerjasama dengan Dinas Perhubungan membuat ciri-ciri khusus seperti hologram, gambar-gambar tersembunyi,

atau jenis kertas pada STNK maupun BPKB.

- b) Razia atau *sweeping* lalu lintas oleh Polantas yang bertujuan untuk memeriksa surat-surat kelengkapan bermotor.
- c) Kepolisian DIY melalui Babinkamtibmas memberikan himbauan atau menganjurkan kepada masyarakat atau pembeli kendaraan bermotor/mobil bekas untuk lebih hati-hati dalam membeli, dengan cara mengecek surat-surat kendaraan bermotor/mobil, baik itu STNK maupun BPKB.
- d) Menghimbau kepada para pengusaha rental mobil/motor untuk mengenali dengan jelas dan benar identitas para penyewa serta bila perlu dipasang GPS pada tiap-tiap kendaraan usaha.

2. Tindakan represif, yaitu:

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Yogyakarta maupun Polres Sleman biasanya melakukan penyelidikan ke komunitas-komunitas jual beli kendaraan *bodong* (kendaraan-kendaraan yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan). Penyelidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polresta Yogyakarta ini dilakukan bisa dengan cara penyamaran (*undercover*), pembuntutan, interogasi, pelacakan (*tracking*), penyadapan (*tapping*). Setelah diperoleh bukti awal selanjutnya dilakukan

²⁰ Menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP, yang dimaksud dengan Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda

bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

tindakan penyidikan untuk mengumpulkan barang bukti guna menetapkan tersangka untuk selanjutnya diproses secara hukum ke tahap selanjutnya yaitu ke pengadilan.

Saran

Melihat upaya-upaya yang telah dilakukan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta selama penulis melakukan penelitian, penulis menyarankan bahwa Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga penulis hanya menyarankan agar kinerja dan upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta tetap dipertahankan, dan apabila diperlukan, untuk tindakan pencegahan sebaiknya dilakukan koordinasi atau kerjasama dengan pihak/instansi terkait agar angka pemalsuan surat kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Daerah Yogyakarta dapat dikurangi atau diminimalisir.

5. REFERENSI

Buku

- ¹ Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia* 2, PradyaParamitha, Jakarta, Hlm. 2.
- ¹ Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 53.
- ¹ Sadjijino, 2008, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Cetakan Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 1.
- ¹ Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang, Yogyakarta, hlm. 3.

¹ Departemen Pendidikan, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Keempat, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1091.

Gaussyah. M, 2014, *Peranan dan kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan*, Cetakan Pertama, Kemitraan, Jakarta, hlm. 35.

¹ Pudi Rahardi. H, 2014, *Hukum Kepolisian Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Cetakan Ke-1, Laksbang Grafika, Surabaya, hlm. 56.

¹ Adami Chazawi, 2005, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Cetakan III, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

¹ H. A. K. Moch. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*, Alumni, Jakarta, hlm.190.

Website

¹ *Krisnapti*, Kedudukan Polri dan System Kepolisian di Era Demokrasi, <file:///D:/Proposal/KEDUDUKAN%20POLRI%20ODAN%20SYSTEM%20KEPOLISIAN%20DI%20ERA%20DEMOKRASI%20%20KRISNAPTI%20K.htm>, diakses 20 Desember 2016, pukul 23:15 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 1974 Tentang Penertiban Perjudian
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia